

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kinerja Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

organisasi sektor publik, setelah adanya oprasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. “Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan *goodgovernance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukan bagaimana menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien” (Mardiasmo 2002:121).

Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan ouput/ input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telahditetapkan. “Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan-perbandingan *outcome* dengan *output*”(Mardiasmo,2002: 4). Adapun arti dari penilaian kinerja menurut Mardiasmo (2002:28) “yaitu penentuan secara priodik efektifvitas oprasional suatu organisasi, bagianorganisasi, karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kreteria yang telah ditetapkan sebelumnya.” Dan menurut keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah manjadi permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja *merupakan* komponen lainnya yng harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerjakeuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Sedangkan menurut Mahmudin (2007 : 25) “Kinerja adalah *gambaran* mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang teruang dalam *stategic planning* suatu organisasi”.

Disamping itu, menurut Sedarmayanti (2003 : 64) “Kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses

manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan dibandingkan standar yang telah ditentukan". Faktor kemampuan sumber daya aparatur pemerintah terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan *ability (knowledge + skill)*, sedangkan faktor motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) sumber daya aparatur pemerintah dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan sumber daya aparatur pemerintah dengan terarah untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu *good governance*.

Dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa Perhitungan APBD.

Menurut Chandra (1999) dalam Laki (2004), penganggaran partisipatif (*participative Budgeting*) yaitu semua level manajemen terlibat aktif dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam periode tertentu, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan. Kegiatan selama periode tersebut (Hanson, 1966 dalam Rahman, 2002). Partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya (Brownel, 1982 dalam Ryninta dan Zulfikar, 2005).

Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Selain itu lembaga non profit ini merupakan lembaga yang orientasi utamanya bukan untuk mencari laba.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi yang sudah mulai aktif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia dan Undang-Undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah sesungguhnya.

Analisis prestasi hal kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk memenuhi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

Maka berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012-2014 gambaran kondisi riil pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam anggaran belanja daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan data mengenai penetapan alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung selama 3 (Tiga) tahun berturut-turut yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Table 1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012-2014 (dalam rupiah)

URAIAN BELANJA LANGSUNG	2012		2013		2014	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai/personalia	11,337,607,538	9,560,856,677	15,038,888,580	14,526,416,468	15,916,592,153	14,354,702,662
Belanja Barang dan Jasa	52,109,605,501	46,942,033,641	73,308,226,836	68,265,862,993	82,827,110,554	61,523,572,783
Belanja Modal	150,048,771,961	107,878,496,655	167,796,094,103	128,851,511,841	117,377,657,633	104,939,810,346
Total	213,495,985,000	164,381,386,973	256,143,209,519	211,643,791,302	216,121,360,340	180,818,085,791

Sumber :Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT

Table 2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas pertambangan
Energi Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2012-2014
(dalam rupiah)

URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	2012		2013		2014	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	172,369,109,939	167,996,000,477	185,479,199,920	187,454,351,876	218,762,143,707	218,048,173,826
Belanja Hibah	12,127,339,696	10,476,153,216	6,532,781,000	6,348,831,000	1,865,000,000	1,865,000,000
Belanja Bantuan Sosial	8,168,932,649	8,037,026,668	9,904,749,000	11,117,250,700	10,813,922,611	10,472,323,824
Belanja Bantuan Keuangan	23,299,135,600	22,626,382,679	29,482,537,600	28,008,592,989	40,489,063,648	37,820,052,139
Belanja Tidak Terduga	1,360,852,116	965,137,318	1,408,222,961	700,000,000	1,220,025,694	500,000,000
Total	217,325,370,000	210,100,700,358	232,807,490,481	233,629,026,565	273,150,155,660	268,705,549,789

Sumber :Dinas Pertambangan dan EnergiPrivinsi NTT

Table. 1 dan 2 diatas memperlihatkan bahwa tidak semua sektor dalam belanja mengalami peningkatan dan penurunan namun cenderung mengalami fluktuatif. Oleh karena itu perlu diketahui proporsi dari masing-masing belanja dan menilai belanja Dinas Pertambangan dan Energi dari setiap sektor belanja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA BELANJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PADA PROVINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2012 - 2014”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar proporsi anggaran belanja masing-masing komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas pertambangan dan Energi ?
2. Seberapa besar tingkat efisiensi belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas pertambangan dan Energi ?
3. Seberapa besar tingkat laju pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas pertambangan dan Energi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya proporsi anggaran belanja masing-masing komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun anggaran 2010-2013.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas belanja langsung dan belanja tidak langsung Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2010-2013.
3. Untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2010-2013.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1 Bagi Dinas pertambangan dan Energi Provinsi NTT sebagai bahan informasi dan sumbangan penulis berkaitan dengan Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada APBD tahun anggaran 2012-2014
- 2 Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian lebih lanjut tentang belanja langsung dan belanja tidak langsung di Dinas pertambangan dan Energi Provinsi NTT.